

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pengkajian Mpr Ri. *Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Pengkajian Mpr Ri, 2017.
- . *Penataan Dan Wewenang Tugas Mpr*. Jakarta Pusat: Perpustakaan Nasional, 2020.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Hermawan, Muhammad Ilham. *Teori Penafsiran Konstitusi Implikasi Pengujian Konstitusi Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Husen, La Ode, Dan Nurul Qamar. *Teori Hukum (Realasi Teori Dan Realita)*. Makasar: Humanities Genius, 2022.
- Md, Mohammad Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2017.
- Mpr Ri. *Panduan Permasyarakatan Uud Nri 1945 Ketetapan Mpr Ri*. Jakarta: Sekretariat Jendral Mpr Ri, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pane, Erina. *Legal Drafting*. Lampung: Harakindo Publishing, 2019.
- Prasetyo, Teguh, Dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Suparto. *Konstitusi Teori, Hukum Dan Perkembangannya*. Jakarta: Bina Karya, 2020.

Tampubolon, Manotar. *Hukum Dan Teori Konstitusi*. Sumatera Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.

Tim Redaksi. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Jurnal

Asnawi, Eddy. “Kedudukan Hukum Ketetapan Mprs/Mpr Sebelum Dan Sesudah Perubahan Uud Nri 1945.” *Ensiklopedia Social Review* 3 No. 2 (2021): 227–36.

Azwani. “Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. Mpr) Sebelum Dan Setelah Amandemen Uud.” *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu* 4 No. 1 (T.T.): 72–89.

Badan Pengkajian Mpr Ri. *Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Badan Pengkajian Mpr Ri, 2017.

Badan Pengkajian Mpr Ri. *Penataan Dan Wewenang Tugas Mpr*. Perpustakaan Nasional, 2020.

Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Sinar Grafika, 2016.

Djati, Daniel Mulia, Jatmiko Dwi Cahyano, Dan H Dedi Canda Wojaya Orpa Lintin. “Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Fakultas Hukum* 5 No.1 (2022): 587–600.

- Efendi, Muhammad Fadli. "Rekonstruksi Hukum Kewenangan Pengujian Tap Mpr Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Magnus Opus* 5 No. 1 (2022): 13–28.
- Fernando, E, Dan M Manulung. "Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis." *Fakultas Hukum, Universitas Indonesia* 5 No. 2 (2019): 262–85.
- Hasibuan, Ali Marwan. "Kekosongan Hukum Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat." *Jurnal Yudisial* 15 No 01 (2022): 121–44.
- Hasibuan, Fadlly. "Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi." *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 22 No. 2 (2023): 42–55.
- Hermawan, Muhammad Ilham. *Teori Penafsiran Konstitusi Implikasi Pengujian Konstitusi Di Mahkamah Konstitusi*. Kencana, 2020.
- Husen, La Ode, Dan Nurul Qamar. *Teori Hukum (Realasi Teori Dan Realita)*. Humanities Genius, 2022.
- Ismaidar, Tamauliana Br Sembiring, Dan Romy Rahadi Saragih. "Politik Hukum Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Dan Sosial* 3 N. 1 (2025): 81–89.
- Kauper, Paul. G. "Judicial Reviw In The Contemporary World." *Michigan Law Review* 70 No. 5 (1972): 987–93.
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Al' Adl* 6 No. 11 (2014): 9–36.
- Manullang, Sardjana Orba, Mawarni Fatma, Rai Iqsandri, Avelia Rahma Y, Dan Mantali. "Legal Certainty Aspects In Regulation Of The Attorney General Number 15 Of 2020 Concerning Termination Of Prosecution Based On Restorative Justice." *Ihsa Institute* 11 No 5 (2022): 3291–98.
- Md, Mohammad Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Pt Raja Grafindo, 2017.
- Mpr Ri. *Panduan Per masyarakatan Uud Nri 1945 Ketetapan Mpr Ri*. Sekretariat Jendral Mpr Ri, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5 No 2 (2017): 172–83.
- Pane, Erina. *Legal Drafting*. Harakindo Publishing, 2019.
- Podung, Beckham Jufian, Donald. A Rumokoy, Dan Wulanmas A. P. G Frederik. "Kedudukan Ketetapan Mpr Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia." *Lex Administratum* 10 No. 1 (2022): 88–97.
- Prasetyo, Teguh, Dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*. Rajawali Pers, 2014.
- Pratiwi, Rani. "Analisis Kedudukan Hukum Ketetapan Mpr Ri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Iain Palopo, 2023.
- Prianto, Wahyu. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kalsen Dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2 No 1 (2024): 8–19.
- Soaduon, Andre. "Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat." Universitas Jendral Soedirman, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suparto. *Konstitusi Teori, Hukum Dan Perkembangannya*. Bina Karya, 2020.
- Susanti, Bivitri. "Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Jentera* 1 No 2 (2017): 128–43.
- Tim Redaksi. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pustaka Baru Press, 2019.
- Warsito. "Kedudukan Mpr Sebelum Dan Sesudah Amandemen Uud 1945." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9 No. 2 (2022): 139–54.
- Wicaksono, Dian Agung. "Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr Dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum Yang Adil Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 10 No 1 (2013): 144–78.

Zeldi, Mr. "Application Of Theory And Regulation Of Hierarchy Legal Regulations In The Problem Of Forest Area Status." *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science* 343 (2019): 1–6.

Internet

Penulis Info Hukum. "Pengertian Revisi UU, Syarat dan Contohnya.": Info Hukum. 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-revisi-uu-syarat-dan-contohnya/>. Diakses pada hari Jumat, 23 Mei 2024 Pukul 16.43 WITA.

Tim Penulis. (2025). "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Jenis-jenisnya". HukumKu. Diakses pada Kamis, 1 Januari 2025. <https://www.hukumku.id/post/hierarki-peraturan-di-indonesia#:~:text=Apa%20Itu%20Hierarki%20Peraturan%20Perundang,dalam%20penerapan%20hukum%20di%20Indonesia.&text=Menurut%20U%20No.%2012%20Tahun,dan%20kepastian%20dalam%20pelaksanaan%20aturan>

Undang-Undang/Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/2009

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

